

Abstrak

Seiring dengan adanya reformasi sektor publik dan disertai dengan adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Dengan adanya tuntutan tersebut menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah didasarkan pada asas desentralisasi yang telah dianggarkan dalam APBD. Sumber dana bagi pemerintah daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil) dan Pinjaman daerah. Dalam penelitian ini menguji Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Belanja Daerah di wilayah D. I Yogyakarta secara parsial. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen tersebut terhadap Belanja Daerah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan DBHSDA tidak memiliki pengaruh baik positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut berarti bahwa DAU, DAK, PAD memiliki proporsi yang sangat berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Sedangkan untuk DBHSDA sama sekali tidak memiliki proporsi yang besar terhadap Belanja Daerah.

Keyword : Dana Alokasi Umum, dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Belanja Daerah.